



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN 2021

**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Pada dasarnya, Laporan Bulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran yang berjalan setiap bulannya, selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP. Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Singaraja, 29 Oktober 2021
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.....	6
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 Tujuan dan Sasaran	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	9
BAB III PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain : keterbukaan / transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga mampu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menentukan yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- 1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public; dan
- 3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- 4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pengembangan Perdagangan

- a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi
- b. Seksi Pengendalian Brang Pokok dan Penting
- c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4. Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan
- b. Seksi Tertib Niaga
- c. Seksi Pengawasan

5. Bidang Perindustrian

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri
- c. Seksi Pemberdayaan Industri

6. Bidang Koperasi

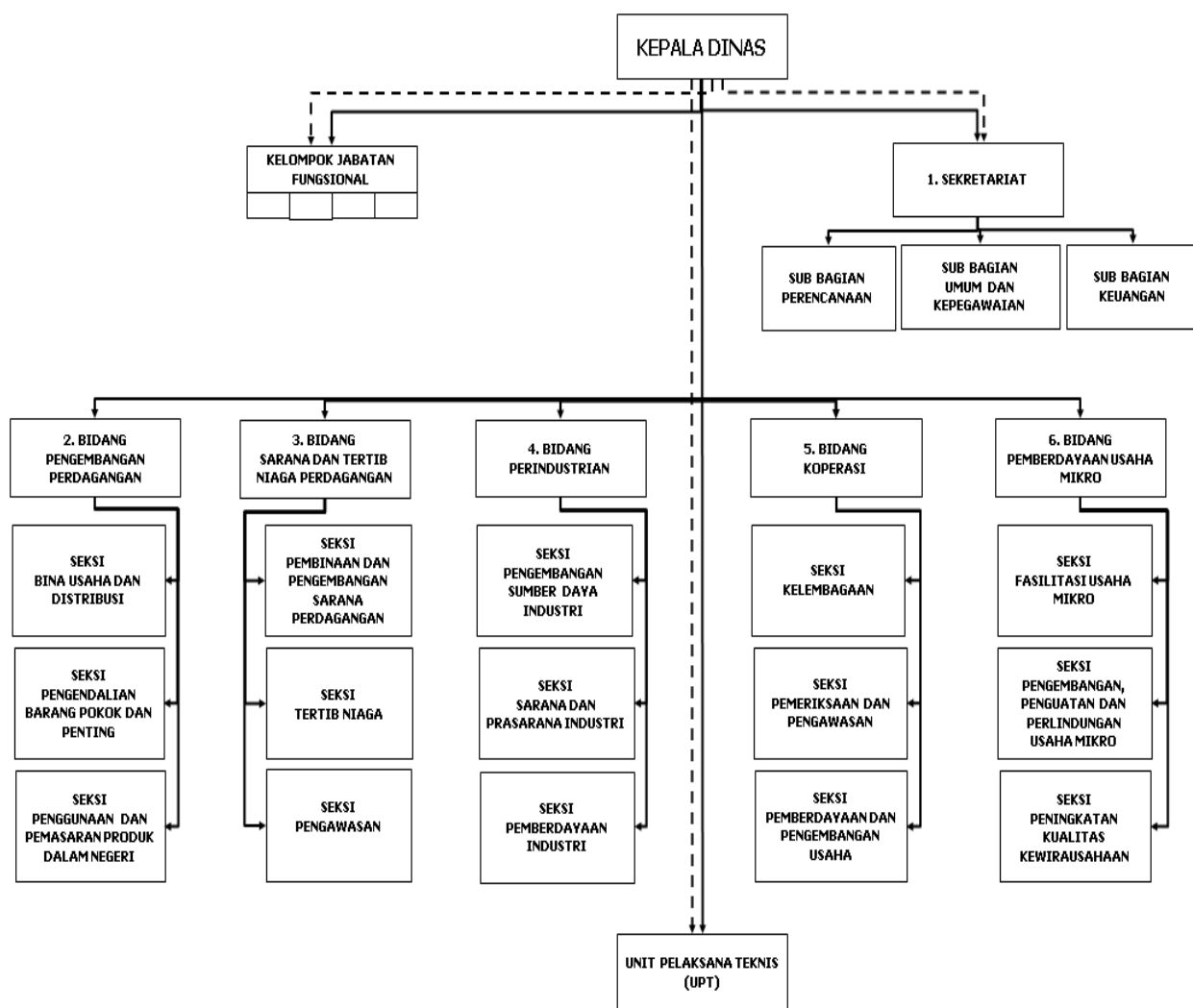
- a. Seksi Kelembagaan
- b. Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

7. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 terdiri dari:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

1.2 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

BAB III

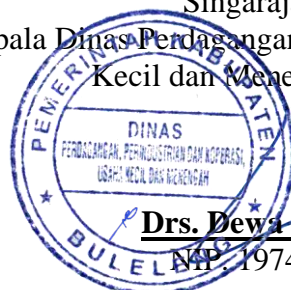
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah serta dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

NIP. 19741014 199311 1 001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target BILAN AN												Program	Kegiatan		Target BILAN AN												Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target BILAN AN												Anggaran	Peninggah Jawab																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Uraian	Indikator Outcome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Uraian	Indikator Output	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
															PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perwestase Capaian RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu																																65%	222.569.882	Pengawasan Kehatan, Komandir, Ketangahaan, serta Akutabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berimbang sesuai dengan regulasi				5 Koperasi				10 Koperasi				20 Koperasi												30 Koperasi	222.569.882	Subj Pemeriksaan dan Pengawasan		
															PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOP/SP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perwestase Capaian RAT (Anggaran Rumah Tangga)				10%				36%				54%																						72%	67.804.324	Pelaksanaan Penelitian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat keahatannya				10 Koperasi				20 Koperasi				30 Koperasi												50 Koperasi	67.804.324	Subj Pemeriksaan dan Pengawasan
2	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal			6,5%	8,7%	10,8%	13%	15,2%	17,3%	19,5%	21,7%	23,8%	26%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Peminaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Peninggiat Kewentangan	Jumlah UMKM yang berjenis lengkap			198 UMKM				397 UMKM			594 UMKM			794 UMKM	206.724.200	Facilitasi Kemudahan Peminaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang ditulitiasi oleh pemerintah UMKM melalui OS																							270 UMKM	206.724.200	Subj Facilitasi Usaha Mikro																						
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Stabilitas			0,30%	0,43%	0,54%	0,55%	0,76%	0,87%	0,90%	1,00%	1,19%	1,3%		Jumlah dokumen UMKM terdata Online Data Sistem (ODS)			229 UMKM			458 UMKM			687 UMKM			916 UMKM	88.476.945	Pendataan Pemn dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database UMKM yang di buleng				229 UMKM			458 UMKM			687 UMKM												916 UMKM	88.476.945	Subj Peningkatan Kualitas Kewirasahaan																									
																Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Peminaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Peninggiat Kewentangan	Jumlah UMKM yang memanfaatkan Model Usur											50 UMKM	57.221.989	Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan informasi penyediaan permodalan																						50 UMKM	57.221.989	Subj Pengembangan dan Perindangan Usaha Mikro																									
																Jumlah pelaku UMKM yang berorientasi							30 Pelaku Usaha			60 Pelaku Usaha	227.506.000	Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang di dilat							30 Pelaku Usaha			60 Pelaku Usaha											60 Pelaku Usaha	227.506.000	Subj Peningkatan Kualitas Kewirasahaan																												
																Jumlah sarana dan prasarana UMKM yang memadai	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	208.110.025	Koordinasi dan Sirkulasi dengan Para Peninggiat Kewentangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah central UMKM yang dibina				1 central			2 central			3 central											5 central	208.110.025	Subj Pengembangan dan Perindangan Usaha Mikro																											
															PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah sarana dan prasarana UMKM yang memadai	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	57.521.100	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk	Jumlah produk UMKM yang ditulitiasi dalam akses permasalahannya				11 Produk			20 Produk			30 Produk												45 Produk	57.521.100	Subj Facilitasi Usaha Mikro																								
																Jumlah Produk UMKM			5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM	5 produk UMKM		Pemasaran, SIM, serta Pemas dan Pibnologi	Jumlah UMKM yang memanfaatkan IT																					90 UMKM																												

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Program	Kegiatan		Target												Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target												Anggaran	Penanggung Jawab																	
			BILAN AN													Uraian	Indikator Outcome	BILAN AN													Uraian	Indikator Output	BILAN AN																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
		Persentase Kegiatan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan BZ			20%	27%	34%	40%	47,3%	54%	60%	67,5%	74,3%	81%	PROGRAM STANDARISASI DAN PENGENDALIAN KONTAMIN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Herpa, Tera, Tera ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTPP (Ukur Takar Timbang dan Perlangkapanan) yang Ditera dan Tera ulang	-	-	2000	UTTP	-	-	4000	UTTP	-	-	6000	UTTP	-	-	8000	UTTP	215.158.790	Pelaksanaan Metrologi Legal, Herpa, Tera, Tera ulang	Jumlah Alat UTPP (Takar, Ubur, Timbang dan Perlangkapanan) bertera ulang	-	-	2000	UTTP	-	-	4000	UTTP	-	-	6000	UTTP	-	-	8000	UTTP	215.158.790	UPTD Metrologi									
															Pelaksanaan Metrologi Legal, Herpa, Tera, Tera ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Kemetrologian	-	-	25%	-	-	50%	-	-	75%	-	-	100%		Pengawasan/ Penyehatan Metrologi Legal	Jumlah BDKT yang Diawasi	-	-	7	BDKT	-	-	12	BDKT	-	-	20	BDKT	-	-	30	BDKT	82.526.000		82.526.000	Seksi Pengawasan												
																Jumlah Teman BDKT BZ Ditindaklanjuti	-	-	3	BDKT	-	-	7	BDKT	-	-	11	BDKT	-	-	15	BDKT																															
																Jumlah UTPP Bertera Sub	-	-	500	UTTP	-	-	1000	UTTP	-	-	1500	UTTP	-	-	2000	UTTP			Jumlah UTPP yang Diawasi	-	-	125	UTTP	-	-	250	UTTP	-	-	375	UTTP	-	-	500	UTTP												
4	Meningkatkan Sistem Perindustrian yang Mandiri	Persentase Pengendalian Perijinan dan Ketersediaan data IKM												80,00%	PROGRAM PENGENDALIAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pengendalian izin usaha kewenangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	161.426.560	Penelitian dan fasilitasi IKM yang terfasilitasi pemenuhan komitmen	-	-	10	IKM	-	-	15	IKM	-	-	20	IKM	-	-	30	IKM	161.426.560	Seksi Sarana dan Prasarana Industri											
															Penerbitan izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perizinan Usaha Industri (IPUI) dan izin Perizinan Kawasan Industri (IKI) dan izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terdata pada SINas	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM		Penelitian dan fasilitasi IKM yang terfasilitasi pemenuhan komitmen	Persentase ijin yang dipantau	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM												
																Jumlah data IKM yang sudah diolah dan dianalisis	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM		Penelitian dan fasilitasi IKM yang terfasilitasi pemenuhan komitmen	Jumlah data IKM yang terdata pada SINas	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM												
																Jumlah IKM yang telah di analisis, di publikasi dan di evaluasi	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM		Penelitian dan fasilitasi IKM yang terfasilitasi pemenuhan komitmen	Jumlah IKM yang terdata pada SINas	-	-	6	IKM	-	-	8	IKM	-	-	10	IKM	-	-	12	IKM												
																Jumlah IKM/sewa yang mendapat fasilitas sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	IKM		Penelitian dan fasilitasi IKM yang terfasilitasi pemenuhan komitmen	Jumlah IKM/sewa yang mendapat fasilitas sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	IKM										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target BELAN AN												Program	Kegiatan		Target BELAN AN												Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target BELAN AN												Anggaran	Panggung Jawab
			Target													Uraian	Indikator Outcome	Target													Uraian	Indikator Output	Target													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitas Perkantoran	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	140.153.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan dan inventarisasi aset barang milik daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	111.333.900	Bag. Umum dan Kepegawaian
			28.820.000	72.800.000	58.022.200	6.387.500	15.624.000	60.128.000																																						
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.688.596	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42.037.897	Bag. Umum dan Kepegawaian	
			181.360.000	239.223.334	173.067.365																																									
10	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10.506.920.811	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10.506.920.811	Bag. Umum dan Kepegawaian	
173.067.365																																														
Total																																														

Kabupaten Sukoharjo, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Kepegawaian, Perencanaan dan Koperasi,
 Uluhe Kewilayahan dan Perencanaan Kabupaten Sukoharjo
 Ditekan dan Ditandatangani
 Dirjen/Abdi Salsaria, M.Si

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Tersedianya dokumen KIR (Kartu Inventaris Ruangan) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen KIR (Kartu Inventaris Ruangan) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	
7	Tersedianya data sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
8	Tersedianya data pengadaan e-purchasing	Jumlah dokumen pengadaan e-purchasing	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	3 dokumen	Pengelola Data
9	Tersedianya data Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Tersedianya laporan pengaduan masyarakat umum	Jumlah laporan pengaduan masyarakat umum			1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	
11	Tersedianya laporan arsip surat	Jumlah laporan arsip surat	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengelola Surat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Tersedianya Laporan Bulanan Rekap Penerimaan Barang Level Jenis pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Bulanan Rekap Penerimaan Barang Level Jenis pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	
17	Tersedianya Laporan Penerimaan dan Penggunaan Barang Persediaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penerimaan dan Penggunaan Barang Persediaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	
18	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
19	Tersedianya dokumen pegawai pada aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Jumlah dokumen pegawai yang diinput pada aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	Tersedianya laporan ketidakhadiran pada aplikasi G-Absen	Jumlah laporan ketidakhadiran pada aplikasi G-Absen	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengadministrasi Kepegawaian
21	Tersedianya dokumen kenaikan gaji berkala pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen kenaikan gaji berkala pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 dokumen	
22	Tersedianya data pegawai yang dipotong tamsilnya pada aplikasi G-Tamsil	Jumlah data pegawai yang dipotong tamsilnya pada aplikasi G-Tamsil	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	
23	Tersedianya hidangan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah menyiapkan makanan dan minuman pegawai dan tamu pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	
24	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja pimpinan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja pimpinan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab	
			BULANAN													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	Tersedianya sarana prasarana pertemuan/rapat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah menyiapkan sarana prasarana pertemuan/rapat Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pramu Bakti	
26	Tersedianya sarana dan prasarana upacara pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang disiapkan	Jumlah menyiapkan sarana dan prasarana upacara pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang disiapkan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan		
27	Tersedianya laporan transaksi Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	Jumlah laporan transaksi Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 Laporan transaksi		


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab	
			BULANAN													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	Tersedianya laporan transaksi pembayar/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS	Jumlah laporan transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP UP/GU/TU/LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 laporan transaksi	Bendahara
29	Tersedianya laporan transaksi pemotongan/pemungutan pajak	Jumlah laporan transaksi pemotongan/pemungutan pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 laporan transaksi		
30	Tersedianya laporan penutupan kas pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penutupan kas pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan		
31	Tersedianya penerimaan dan penyeteroran retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	Jumlah kwitansi penerimaan dan penyeteroran retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan		Bendahara
32	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan	Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	Terlaksananya pengujian kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan belanja	Jumlah dokumen pertanggungjawaban belanja yang diuji kebenaran dan kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 dokumen	Pengadministrasi Keuangan
48	Terlaksananya registrasi bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LS	Jumlah bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LS yang diregistrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 dokumen		
49	Terlaksananya pengesahan SPP dan SPM	Jumlah SPP dan SPM yang disahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 dokumen		
50	Tersedianya draft penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah draft penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	30 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Analisis Koperasi
51	Tersedianya dokumen Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah dokumen Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	-	-	5 dokumen	-	-	10 dokumen	-	-	20 dokumen	-	-	30 dokumen	
52	Tersedianya dokumen pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah dokumen pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi	-	-	5 dokumen	-	-	10 dokumen	-	-	20 dokumen	-	-	30 dokumen	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	Tersedianya laporan pengukuran kinerja kegiatan pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro	Jumlah laporan pengukuran kinerja kegiatan pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro yang dibuat	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha pada Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
54	Tersedianya dokumen SPJ pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro	Jumlah dokumen SPJ pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
55	Tersedianya dokumen surat masuk dan surat keluar pada seksi Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah dokumen surat masuk pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen surat keluar pada seksi Fasilitasi Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
56	Tersedianya data pelaku usaha	Jumlah dokumen pelaku usaha yang didata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
57	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa	Jumlah laporan pengawasan barang beredar dan jasa	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa pada Seksi Pengawasan
58	Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, pengamatan serta pengawasan BDKT dan UTTP	Jumlah laporan pembinaan, penyuluhan, pengamatan serta pengawasan BDKT dan UTTP	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	Tersedianya laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada seksi Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada seksi Sarana dan Prasarana Industri yang dibuat	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha pada Seksi Sarana dan Prasarana Industri
60	Tersedianya dokumen surat masuk dan surat keluar pada seksi Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen surat masuk pada seksi Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen surat keluar pada seksi Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
61	Tersedianya data sentra industri	Jumlah sentra industri yang terdata	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolah Produk seksi Pengembangan Sumber Daya Industri
62	Tersedianya dokumen Izin Usaha Industri (IUI)	Jumlah dokumen Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	6 IKM	-	-	12 IKM	-	-	18 IKM	-	-	25 Dokumen	
63	Tersedianya laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada seksi Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada seksi Pengembangan Sumber Daya Industri yang dibuat	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Penanggungjawab
			BULANAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	Tersedianya dokumen surat masuk dan surat keluar pada seksi Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen surat masuk pada seksi Pengembangan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolah Produk seksi Pengembangan Sumber Daya Industri
		Jumlah dokumen surat keluar pada seksi Pengembangan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Singaraja, 29 Oktober 2021
 Kepala Dinas Pengolahan, Perindustrian dan Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
 NIP. 19741014 199311 1 001